

JURNAL KEPENDIDIKAN

Pengaruh Penggunaan Media PG2L Melalui Model Direct Instruction terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Persamaan Garis Lurus

Muhdar

Pendampingan Terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama Mengidentifikasi Masalah Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Sri Sugiarto & Riadi Suhendra

Pengembangan Tes Diagnostik untuk Miskonsepsi pada Materi Usaha dan Energi Berbasis Adobe Flash Kelas XI di Ma Nw Samawa Sumbawa Besar Tahun Ajaran 2017/2018

Reni Eka Zafitri, Syarif Fitriyanto & Fahmi Yahya

Penerapan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Setting Sekolah Inklusif (Studi Kasus di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila Gis dan SDN Bromantakan)

Dwi Arnia Ulfa, Sunardi & Abdul Salim

Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII MTsN 1 Sumbawa Tahun Pelajaran 2017/2018

Tanti Septiawati, Nining Andriani, & Suharli

Pelatihan Pembuatan Media Lapbook Berbasis Saintifik untuk Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Lito

Wiji Noviati & Eryuni Ramdhayani

Pelatihan Pembuatan Herbarium Sebagai Media Pembelajaran Keanekaragaman Hayati pada Kelas VIII SMP Negeri 3 Moyo Hulu Tahun 2017

Indah Dwi Lestari & Syafruddin

Peran Guru dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

Ana Merdekawaty

Pengembangan Bahan Ajar IPS Ekonomi Menggunakan Model *Dick and Carrey* Kelas X Semester I di SMAN 3 Sumbawa Besar

Erma Suryani & Fitri Hanay



JURNAL KEPENDIDIKAN

ISSN 2302-111X

VOLUME 2 NOMOR 2 FEBRUARI 2018

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa

Ketua Dewan Redaksi

Syarif Fitriyanto, M.Pd.

Dewan Redaksi:

Sri Sugiarto, M.Pd.
Junaidi, M.Pd.

Redaksi Pelaksana:

Sri Rahayu, S.Pd., M.E.
Eryuni Ramdhayani, M.Pd.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Mahsun, M.Hum.
Dr. Muhammad Sukri M.Hum.
Dr. Gunawan, M.Pd.
Dr. Inyoman Sutama, M.M.

Penerbit

FKIP Universitas Samawa

Jl. Raya Bay Pass Sering Sumbawa Besar

[Http://www.fkipunsa.ac.id/](http://www.fkipunsa.ac.id/)

Telp. 0371-625848; 21236, fax: 0371-625848 atau HP. 085338284278

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Pengaruh Penggunaan Media PG2L Melalui Model Direct Instruction terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Persamaan Garis Lurus	
Muhdar.....	1
Pendampingan Terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama Mengidentifikasi Masalah Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	
Sri Sugiarto & Riadi Suhendra	12
Pengembangan Tes Diagnostik untuk Miskonsepsi pada Materi Usaha dan Energi Berbasis Adobe Flash Kelas Xi di Ma Nw Samawa Sumbawa Besar Tahun Ajaran 2017/2018	
Reni Eka Zafitri, Syarif Fitriyanto & Fahmi Yahya	19
Penerapan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Setting Sekolah Inklusif (Studi Kasus di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila Gis dan SDN Bromantakan)	
Dwi Arnia Ulfa, Sunardi & Abdul Salim.....	35
Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII MTsN 1 Sumbawa Tahun Pelajaran 2017/2018	
Tanti Septiawati, Nining Andriani, & Suharli.....	48
Pelatihan Pembuatan Media Lapbook Berbasis Saintifik untuk Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Lito	
Wiwi Noviati & Eryuni Ramdhayani	66
Pelatihan Pembuatan Herbarium Sebagai Media Pembelajaran Keanekaragaman Hayati pada Kelas VIII SMP Negeri 3 Moyo Hulu Tahun 2017	
Indah Dwi Lestari & Syafruddin.....	71
Peran Guru dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja	
Ana Merdekawati	77
Pengembangan Bahan Ajar IPS Ekonomi Menggunakan Model <i>Dick and Carrey</i> Kelas X Semester I di SMAN 3 Sumbawa Besar	
Erma Suryani & Fitri Hanaya	87

**PENERAPAN KURIKULUM BERDIFERENSIASI
DALAM SETTING SEKOLAH INKLUSIF**
**(Studi Kasus Di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila GIS dan SDN
Bromantakan)**

Oleh

Dwi Arnia Ulfa¹⁾, Sunardi²⁾, Abdul Salim³⁾

^{1),2),3)}Magister Pendidikan Luar Biasa, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
dwiarniaulfa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of differentiated curriculum in 4 inclusive schools. The method used in this research is qualitative research type case study. Technique of collecting data in this research is interview. Data analysis are done through data reduction, data presentation and conclusion. The research was conducted at SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila and SDN Bromantakan. Based on the results of the research, it was found that (1) the 4 inclusive schools have undertaken a differentiated curriculum in the setting of inclusive schools due to modifications in intended goals, content, process and evaluation components, (2) there is a collaborative team in the implementation of differentiated curriculum, but there should be awareness raising of all school personnel related to the implementation of the differentiated curriculum in the setting of inclusive schools, and (3) the evaluation of the differentiated curriculum has been carried out although there are still those who have not conducted regular evaluations regarding the implementation of the differentiated curriculum.

Key words: *differentiated curriculum, the setting of inclusive schools*

PENDAHULUAN

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak lainnya dalam satu kelas tanpa melihat hambatan maupun perbedaan yang dimilikinya. Hal ini didukung oleh pernyataan Evans (2007) yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang berusaha

mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

Sekolah pada umumnya memiliki sasaran bahwa semua siswa harus memiliki prestasi belajar dengan kriteria rata-rata. Sedangkan pendidikan inklusif mengkritik pengajaran yang didasarkan pada kriteria rata-rata, karena pada kenyataannya beberapa murid tidak akan mampu mengimbangi, sementara yang lain akan merasa mudah

untuk mencapai kriteria rata-rata tersebut. Pendidikan inklusif menempatkan murid sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan pada penghargaan dalam pemahaman, perasaan, keterampilan sosial dan persepsi, serta lain sebagainya sehingga menyebabkan semua murid memiliki kesempatan optimal untuk menjadi termotivasi dan diaktifkan (UNESCO, 2005:25).

Pendidikan inklusif dilakukan dalam sistem sekolah. Menurut Kustawan (2012) dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) telah memiliki ijin operasional dari Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel, (3) tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar, (4) tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar, (5) tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik, dan (6) mendapat rekomendasi penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Pemerintah Provinsi. Adapun persyaratan nomer 6 ini berkaitan erat dengan

fasilitas atau dukungan dana atau sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Salah satu hal yang penting dalam pendidikan khusus adalah kurikulum. Kurikulum berkaitan dengan konteks/materi, cara menyampaikan materi, cara menilainya serta sumber daya yang digunakan (UNESCO, 2004:13). Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan atau pendidikan yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi/materi, proses dan evaluasi (Budiyanto, dkk, 2013:78). Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik yang bervariasi, mulai dari yang bersifat ringan, sedang hingga berat maka dalam implementasinya di lapangan kurikulum reguler tersebut perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik terutama pada anak berkebutuhan khusus (Ashar, 2017:100).

Kurikulum memiliki peranan yang penting dalam pendidikan inklusif, terutama untuk kurikulum yang dapat diakses dan fleksibel bagi anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang fleksibel dan dapat diakses

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus mampu mendorong guru dalam menemukan pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Atas dasar itulah mengapa kurikulum yang fleksibel atau yang sering disebut juga dengan istilah kurikulum berdiferensiasi harus diterapkan dalam pendidikan inklusif, terutama dalam setting kelas inklusif. Menurut UNESCO (2004:14) kurikulum berdiferensiasi adalah proses memodifikasi atau mengadaptasi kurikulum sesuai dengan tingkat kemampuan yang berbeda dari siswa dalam satu kelas. Kurikulum berdiferensiasi memungkinkan guru dapat menyesuaikan atau memodifikasi kurikulum dengan mengubah tujuan, materi, metode dan penilaian dalam pembelajaran.

Anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan dalam setting sekolah inklusif memiliki kemampuan yang tidak sama dengan anak reguler, sehingga mereka membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu perlu adanya penerapan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif. Selain itu, dengan adanya kurikulum berdiferensiasi, anak berkebutuhan khusus memiliki akses untuk kurikulum reguler. Hal ini sesuai dengan pendapat Mudjito, dkk (2012) yang menyatakan bahwa kurikulum yang disesuaikan untuk pendidikan inklusif di

dalamnya terdapat kurikulum reguler dan Program Pembelajaran Individual (PPI).

Pada kenyataannya, masih banyak sekolah inklusif yang belum menerapkan kurikulum berdiferensiasi untuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan penelitian Yuwono (2017) menyatakan bahwa dari 4 sekolah inklusi yang diteliti, sebanyak 2 sekolah masih belum efektif dalam menerapkan kurikulum yang fleksibel bagi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Penerapan kurikulum berdiferensiasi yang belum efektif juga ditemukan dalam penelitian Khairunnisa, dkk (2017) yang menemukan bahwa belum adanya RPP khusus atau PPI dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dalam setting sekolah inklusif. Selain itu, belum adanya fasilitas sarana dan prasarana berupa buku pelajaran yang ditulis menggunakan huruf braille untuk anak tunanetra.

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 diantaranya :

1. Kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada tiga model pengembangan

kurikulum yaitu model kurikulum reguler penuh, model kurikulum reguler dengan modifikasi dan model kurikulum PPI.

2. Tenaga pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.
3. Sarana dan prasarana khusus untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik.
4. Evaluasi atau penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif yang terdapat pada pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di beberapa sekolah inklusi. Selanjutnya dari fokus tersebut dirinci menjadi tiga subfokus, yaitu: (1) pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif; (2) kolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi setting sekolah inklusif; dan (3) evaluasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara dekriptif bagaimana penerapan kurikulum berdiferensiasi dalam setting sekolah inklusif di beberapa sekolah inklusi yang telah diteliti oleh peneliti. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2010:60).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif. Wawancara dilakukan pada guru pembimbing khusus (GPK) dari 4 sekolah inklusi yang terdapat di Kota Surakarta dan Kota Batu, Malang. Dari 4 sekolah tersebut terdiri dari 2 sekolah inklusi di Kota Surakarta dan 2 lainnya dari Kota Batu, Malang. Adapun sekolah yang terdapat di Kota Surakarta yaitu SD Lazuardi Kamila GIS dan SDN Bromantakan. Sedangkan sekolah yang terdapat di Kota Batu adalah SDN Junrejo 1 dan SDN Beji 1. Data yang dihasilkan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada guru pembimbing khusus (GPK) yang terdapat di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila GIS dan SDN Bromantakan, ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Seting Kelas Inklusif

SDN Junrejo 1 merupakan sekolah inklusi sejak tahun 2004, walaupun pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2005. Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Junrejo 1 dilaksanakan dalam beberapa model pengelolaan kelas yaitu kelas reguler sepanjang hari, kelas reguler sebagian waktu (*pull out*) serta kelas khusus. Kurikulum berdiferensiasi dilakukan berdasarkan tingkatan ketunaan anak. ABK dengan ketunaan ringan akan memperoleh modifikasi dalam kurikulum pada tujuan pembelajaran yaitu indikator serta proses dalam penyampaian materi. Anak yang memiliki ketunaan ringan ditempatkan di kelas inklusi dan selama kegiatan belajar mengajar mendapatkan pendampingan tutor sebaya dari teman sebangkunya.

ABK yang mengalami lambat belajar ditempatkan di kelas inklusi, namun sekali waktu mendapatkan layanan di luar kelas (*pull out*). Layanan tambahan untuk anak

lambat belajar sejauh ini berupa membaca dan berhitung. Sedangkan anak yang mengalami ketunaan yang berat ditempatkan di kelas khusus. Anak yang ditempatkan di kelas khusus memperoleh layanan pendidikan berdasarkan PPI (Program Pembelajaran Individual) yang telah dibuat oleh GPK. ABK yang ditempatkan di kelas khusus mendapatkan modifikasi yang hampir menyeluruh baik itu dalam tujuan pembelajaran, materi, proses serta evaluasi.

Selain mendapatkan kurikulum yang dimodifikasi, ABK juga seharusnya mendapatkan layanan kompensatoris. Namun, pelaksanaan layanan kompensatoris bagi ABK di SDN Junrejo 1 masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini karena GPK yang terdapat di SDN Junrejo 1 bukan berasal dari lulusan PLB sehingga merasa kesulitan untuk merancang layanan kompensatoris untuk ABK.

SDN Beji 1 merupakan SD inklusi yang mendapat SK inklusi pada tahun 2014. Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Beji 1 dilaksanakan dalam kelas inklusi dan ada beberapa ABK yang dilakukan dengan model *pull out*. ABK yang mendapatkan layanan dengan model *pull out* adalah ABK yang mengalami kesulitan dalam membaca dan berhitung. Sejauh ini kurikulum dimodifikasi pada komponen proses saja. SDN Beji 1 tidak melakukan

modifikasi pada komponen tujuan, materi serta evaluasi karena adanya anggapan bahwa memodifikasi pada komponen-komponen tersebut membatasi ABK untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Walaupun pada kenyataannya ada siswa yang membutuhkan modifikasi secara menyeluruh dalam proses pembelajaran di kelas.

SD Lazuardi Kamila GIS merupakan salah satu sekolah percontohan inklusi yang terdapat di Kota Surakarta. Terdapat dua macam kurikulum untuk ABK di SD Lazuardi Kamila GIS yaitu kurikulum reguler serta kurikulum berdiferensiasi. Kurikulum reguler diperuntukkan bagi ABK yang tidak ada hambatan pada akademiknya namun terdapat gangguan pada non akademiknya. Sedangkan kurikulum berdiferensiasi diperuntukkan untuk ABK yang tidak bisa mengikuti kurikulum reguler. Kurikulum berdiferensiasi dimodifikasi berdasarkan kondisi masing-masing anak. ABK dengan ketunaan berat akan memperoleh modifikasi kurikulum secara total. Adapun komponen kurikulum yang dimodifikasi tersebut adalah tujuan, konten/materi, proses, serta evaluasi.

ABK baik yang menggunakan kurikulum reguler maupun kurikulum berdiferensiasi ditempatkan di kelas inklusif. Setiap ABK memiliki PPI yang memuat layanan yang mereka butuhkan. Adakalanya ABK memperoleh layanan di luar kelas (*pull out*)

sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya saja terapi okupasi bagi ABK yang memiliki hambatan motorik, maupun terapi wicara bagi ABK yang mengalami hambatan dalam berbicara.

SDN Bromantakan merupakan salah satu SD penyelenggaran inklusi di Kota Surakarta. SDN Bromantakan telah melakukan kurikulum berdiferensiasi bagi ABK di sekolah tersebut. Hal ini karena adanya temuan bahwa dilakukan modifikasi pada materi pelajaran, proses pembelajaran serta penilaian hasil belajar. Salah satu modifikasi proses yang telah dilakukan adalah penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu bagi ABK di dalam kelas inklusi. Penempatan tempat duduk bagi ABK sejauh ini dilakukan dengan cara menempatkan ABK di pojok depan. Selain itu, ada kalanya ABK mendapat layanan di luar kelas (*pull out*) untuk membaca serta berhitung.

2. Kolaborasi dalam Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi Seting Sekolah Inklusif

Implementasi kurikulum berdiferensiasi membutuhkan tim kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Junrejo 1 terdapat anggota tim kolaborasi yaitu guru kelas, dan GPK. Selain itu, pihak sekolah juga melibatkan tenaga profesional dari luar sekolah dalam pengelolaan ABK yaitu

psikolog. Setiap anggota tim kolaborasi memiliki tugas masing-masing dimana kepala bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi, guru kelas bertugas sebagai pelaksana kurikulum berdiferensiasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan GPK bertugas sebagai merancang PPI yang berisi layanan yang dibutuhkan oleh ABK maupun di luar kelas, dan orangtua melanjutkan layanan yang diberikan oleh GPK dan guru kelas di rumah. Sayangnya, terkadang guru kelas masih sering lupa akan keberadaan ABK di dalam kelas sehingga pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi tidak maksimal.

Tim kolaborasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Beji 1 terdiri dari GPK, guru kelas serta guru mata pelajaran. GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran bersama-sama dalam merencanakan dan menerapkan pembelajaran berdasarkan PPI pada ABK di dalam kelas inklusi. Meskipun demikian, belum semua guru kelas mampu diajak bekerjasama dalam penerapan kurikulum berdiferensiasi. Saat ini, GPK di SDN Beji 1 berjumlah 1 orang, sehingga tidak ada teman sesama GPK yang bisa diajak berkonsultasi ketika menghadapi permasalahan terkait layanan bagi ABK. Selain tidak ada teman untuk berkonsultasi, GPK masih merasa kurang efektif dalam menerapkan PPI karena adanya ketentuan dari sekolah dalam

menerapkan PPI hanya 1 jam mata pelajaran selama 1-2 minggu untuk setiap ABK.

Penerapan kurikulum berdiferensiasi di SD Lazuardi Kamila didukung oleh tim kolaborasi yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran serta terapist. Terapist merupakan sebutan lain dari GPK yang terdapat di SD Lazuardi Kamila. Terapist di SD Lazuardi Kamila tidak hanya berlatar belakang PLB saja, namun ada yang berlatar belakang terapi okupasi, psikologi, serta terapi wicara. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan ABK yang didampinginya. Terapist yang memiliki latar belakang bukan dari PLB akan mempelajari dasar-dasar dalam pengajaran yang nantinya berguna untuk merancang PPI.

Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Bromantakan dilakukan dengan kolaborasi antara GPK dan guru kelas. Dimana GPK dan guru kelas akan bekerjasama dalam kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Selain itu, GPK dan guru kelas bekerjasama dalam mempersiapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABK.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Seting Inklusif

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di 4 sekolah inklusif yang diteliti memiliki tenggang waktu yang berbeda. SDN Junrejo 1

melakukan evaluasi dengan waktu yang tidak menentu, evaluasi diadakan setiap ada pertemuan atau rapat yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan SDN Beji 1 melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi pada pembelajaran ABK setiap 6 bulan sekali untuk pelaporan tujuan jangka panjang, sedangkan untuk tujuan jangka pendek dilakukan tidak pasti. SD Lazuardi Kamila melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi rutin setian 3 bulan sekali, hal ini karena PPI dirancang untuk 3 bulan. Kemudian, SDN Bromantakan akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali ketika pembagian raport untuk pelaporan tujuan jangka panjang, sedangkan untuk tujuan jangka pendek dilakukan tidak memiliki waktu yang pasti.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Setting Kelas Inklusif

Kurikulum memiliki empat komponen yaitu tujuan, isi, proses dan evaluasi. Sehingga ketika kurikulum telah didiferensiasikan pada ABK dalam setting inklusif, maka salah satu atau lebih atau bahkan keempat komponen tersebut akan mengalami perubahan. Secara umum, kategori kurikulum ABK dalam setting inklusif terdiri dari dua yaitu (1) kurikulum untuk ABK yang tidak mengalami hambatan

kecerdasan, serta (2) kurikulum untuk ABK yang memiliki hambatan kecerdasan (Budiyanto, 2013:85).

ABK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain hanya membutuhkan sedikit modifikasi dalam pembelajaran. Tujuan dan materi pembelajaran umumnya tidak mengalami perubahan, demikian juga dengan evaluasi. Mereka biasanya lebih banyak membutuhkan modifikasi dalam proses pembelajaran yakni berkaitan dengan cara dan media dalam penyajian informasi (Budiyanto, 2013:85). Sedangkan ABK yang mengalami hambatan kecerdasan (tunagrahita dan gangguan lain yang disertai hambatan kecerdasan) umumnya membutuhkan modifikasi hampir pada semua komponen pembelajaran tujuan pembelajaran harus dimodifikasi, demikian juga dengan materi, proses dan pelaksanaan evaluasi (Budiyanto, 2013:86).

Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila GIS dan SDN Bromantakan masing-masing menggunakan kategori kurikulum ABK yang tidak sama. SDN Junrejo 1 dan SD Lazuardi Kamila GIS menggunakan dua kategori kurikulum yaitu kurikulum untuk ABK tanpa hambatan kecerdasan serta kurikulum untuk ABK dengan hambatan kecerdasan. SDN Junrejo 1 menggunakan kategori kurikulum

untuk ABK tanpa hambatan kecerdasan pada ABK yang berada di dalam kelas inklusif, sedangkan kategori kurikulum pada ABK dengan hambatan kecerdasan digunakan pada ABK yang terdapat di kelas khusus. SD Lazuardi Kamila GIS menggunakan kedua kategori kurikulum tersebut pada seluruh ABK yang terdapat di dalam kelas inklusif. Sedangkan SDN Beji 1 dan SDN Bromantakan lebih menggunakan kurikulum untuk ABK tanpa hambatan kecerdasan, hal ini karena perubahan yang dilakukan hanya terdapat pada komponen proses pembelajaran.

Selain memuat komponen tujuan, isi, proses dan evaluasi, kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif harus memuat layanan kompensatoris untuk ABK. Layanan kompensatoris untuk ABK terdiri dari braille dan orientasi dan mobilitas untuk anak tunanetra, bina persepsi bunyi dan irama untuk anak tunarungu, bina diri untuk anak tunagrahita, bina gerak untuk anak tunadaksa, bina probadi dan sosial untuk tunalaras serta *Activities of Daily Living* (ADL) untuk anak autis. Pelaksanaan layanan kompensatoris bisa disisipkan saat pelajaran berlangsung maupun terpisah dengan pelajaran lain. Guru harus mampu memberikan layanan kompensatoris untuk ABK di sekolah inklusif guna mendukung kemandiriannya. Guru yang mengalami kesulitan dalam merancang program layanan kompensatoris

untuk ABK dapat mencari bahan secara mandiri dari berbagai sumber seperti modul, *browsing* di internet maupun bertanya kepada guru dari sekolah lain terkait layanan kompensatoris bagi ABK.

2. Kolaborasi dalam Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi Seting Sekolah Inklusif

Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif dilakukan oleh beberapa personil. Personil-personil tersebut disebut dengan tim pengembang kurikulum. Adapun tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/ guru pembimbing khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait (Budiyanto, 2013:20). Dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi, tim kolaborasi di SDN Bromantakan terdiri dari GPK dan guru kelas, sedangkan tim kolaborasi tang terdapat di SDN Beji 1 terdiri dari GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran. Tim kolaborasi di SDN Junrejo 1 terdiri dari GPK, guru kelas, serta psikolog. Dan tim pengembang kurikulum SD Lazuardi Kamila GIS terdiri dari terapist, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Istilah terapist di sini merupakan GPK yang tediri dari berbagai latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

Menurut Friend & Cook (dalam Murawski, 2010:9) kolaborasi adalah gaya untuk interaksi secara langsung setidaknya dua pihak yang setara secara sukarela terlibat dalam pengambilan keputusan bersama saat mereka bekerja menuju tujuan bersama. Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif membutuhkan kolaborasi setidaknya dua personil yang dapat bekerjasama dalam merancang pembelajaran yang tepat bagi ABK. Berdasarkan hasil temuan, SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila GIS dan SDN Bromantakan telah melakukan kolaborasi setidaknya antara GPK dan guru kelas serta personil yang lainnya dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi bagi ABK dalam setting inklusif.

Ada beberapa manfaat yang didapatkan ketika terjalin kolaborasi antar guru. Pertama, dapat membantu mencapai tujuan yang lebih kompleks, meningkatkan interaksi sosial, dan bahkan meningkatkan kreativitas (Hughes & Murawski, Pugach & Johnson, dalam Murawski, 2010: 10). Kedua, guru dapat membantu orang lain dengan pemecahan masalah dengan lebih baik (Foley & Mundschenk, Snell & Janney, dalam Murawski, 2010:10). Serta ketiga, guru yang berkolaborasi dengan pendidik lain menemukan bahwa mereka lebih mampu memodelkan dan mengkomunikasikan nilai perilaku kolaboratif kepada siswa mereka

(Villa et al, Weinstein, dalam Murawski, 2010:10).

Tim kolaborasi yang terdapat di sekolah inklusif diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ABK. Namun, ketika tim kolaborasi sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ABK, maka perlu adanya kerjasama dengan sekolah lain. Kerjasama bisa dilakukan dengan SLB terdekat maupun sekolah inklusif terdekat lainnya, terutama jika ada sekolah inklusif yang menjadi rujukan sekolah inklusif. Selain itu, perlu adanya ketetapan dari sekolah inklusif terkait latar belakang GPK yang berasal dari lulusan PLB. Tetapi ketika semua GPK tidak memiliki latar belakang PLB, maka perlu diadakan pelatihan bagi GPK terkait dengan pembelajaran bagi ABK, penyusunan PPI, merancang program layanan kompensatoris dan lain sebagainya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Berdiferensiasi dalam Setting Sekolah

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun

menyusun program lanjutan (Widoyoko, 2014:6). Evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai program yang telah dilakukan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun program yang dimaksud dalam kurikulum berdiferensiasi ini adalah pelaksanaan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang telah disusun oleh GPK dan dibantu oleh beberapa personil dari tim kolaborasi yang berada di sekolah inklusif.

Program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang (Widoyoko, 2014:8). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa PPI adalah suatu rangkaian pembelajaran yang direncanakan untuk ABK dan pelaksanaannya berlangsung secara berkesinambungan, yang terjadi di sekolah inklusif dan melibatkan tim kolaborasi. Dengan adanya evaluasi pada PPI, maka dapat diperoleh informasi mengenai pelaksanaan PPI berupa pencapaian yang diperoleh ABK dan kemudian dapat diambil keputusan mengenai rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Evaluasi pada pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi dalam setting

inklusif yang dilakukan di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila dan SDN Bromantakan sejauh ini sudah berjalan walaupun dalam pelaksanaannya belum konsisten. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa SD Lazuardi Kamila rutin mengadakan evaluasi setiap 3 bulan sekali, sedangkan SDN Beji 1 dan SDN Bromantakan mengadakan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk tujuan jangka panjang namun evaluasi untuk jangka pendek tidak memiliki kurun waktu tertentu, dan SDN Junrejo 1 mengadakan evaluasi berdasarkan kapan diadakan rapat sekolah dan ini tidak terjadwal.

Pelaksanaan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan rutin dan terjadwal. Hal ini dikarenakan tujuan dari evaluasi adalah untuk memperoleh informasi akurat terkait dengan proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi tersebut (Widoyoko, 2014:6). Selain itu, akan lebih baik apabila evaluasi melibatkan orangtua dan pihak sekolah terutama tim kolaborasi, sehingga orangtua mengetahui pencapaian yang diperoleh anak dan sekiranya dapat memberikan saran untuk rencana yang akan dilakukan selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila dan SDN

Bromantakan sudah melaksanakan kurikulum berdiferensiasi dalam setting inklusif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya modifikasi pada salah satu atau lebih bahkan semua pada komponen kurikulum yaitu tujuan, proses, isi dan evaluasi. Namun, masih ada sekolah yang mengalami kesulitan untuk merancang program layanan kompensatoris sehingga perlu adanya pelatihan terkait layanan kompensatoris untuk GPK di sekolah inklusif.

Pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila dan SDN Bromantakan sudah memiliki tim kolaborasi. Umumnya tim kolaborasi ini terdiri dari guru kelas dan GPK, namun ada pula dengan personil lainnya seperti guru mapel, psikolog dan terapis. Namun masih ditemukan sikap acuh guru pada ABK di sekolah inklusif sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran seluruh personil sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk ABK di sekolah inklusif.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi sudah dilaksanakan di SDN Junrejo 1, SDN Beji 1, SD Lazuardi Kamila dan SDN Bromantakan. Evaluasi dilakukan dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Ada sekolah yang melakukan evaluasi 3 bulan sekali, ada pula yang melakukan 6 bulan sekali dan ada yang melakukan berdasarkan rapat sekolah. Evaluasi seharusnya dilakukan

rutin dan terjadwal untuk proses pengambilan keputusan pada rencana yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, Muhammad Nurul. (2017). *Studi Deskriptif Penerapan Kurikulum 2013 Bagi Peserta Didik Dengan Spektrum Autis Di Sekolah Inklusif SDN Ketintang II/40 Surabaya*. Dalam Proceeding ICSAR (International Conference on Special Education in Southeast Asia Region) 7th 2017. (hal. 99-106). Malang: Universitas Negeri Malang
- Budiyanto, dkk. (2013). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas.
- Evans, L. (2007). *Inclusion*. Ney York: Routledge.
- Khairunnisa, dkk. 2017. *Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif*. Dalam Proceeding ICSAR (International Conference on Special Education in Southeast Asia Region) 7th 2017. (hal. 73-79). Malang: Universitas Negeri Malang
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta
- Murawski, Wendy W. 2010. *Collaborative Teaching In Elementary School: Making The Co-Teaching Marriage Work!*. California: A SAGE Company.
- Permendiknas No. 70 th. 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO. (2004). *Changing Teaching Practice Using Curriculum Differentiation To Respond To Students' Diversity*. Paris: UNESCO
- UNESCO. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO
- Widoyoko, S. Eko Putro. 2014. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogjakarta:Pustaka Pelajar
- Yuwono, Imam. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif SD Di Banjarmasin*. Dalam Proceeding ICSAR (International Conference on Special Education in Southeast Asia Region) 7th 2017. (hal. 545-548). Malang: Universitas Negeri Malang